

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun (BPS, 2007:2).

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktifitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka-angka PDRB sebagai indikator ekonomi makro, juga sebagai landasan ekonomi evaluasi kinerja perekonomian dan penyusunan berbagai kebijakan. Indikator ekonomi ini juga memberikan gambaran aliran seluruh nilai

tambah barang dan jasa yang menghasilkan dan seluruh faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perekonomian untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa.

2.1.1.2 Fungsi Produk Domestik Regional Bruto

Adapun fungsi PDRB antara lain sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi menghasilkan oleh suatu daerah atau provinsi, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
- 2) Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk suatu region atau provinsi.
- 3) Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.
- 4) PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peran sektor perekonomian dalam suatu wilayah, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- 5) PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar.
- 6) Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor ekonomi.
- 7) PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau provinsi.

- 8) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRB perkapita atau peratu orang.
- 9) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

2.1.2 Investasi atau Penanaman Modal

2.1.2.1 Pengertian Investasi

Menurut Todaro (2000:137-138), “Investasi memainkan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan perekonomian bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan pekerjaan”.

Penambahan pada pendapatan akan mendorong peningkatan investasi, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi. Walaupun suatu perusahaan lain memilih menggunakan dana nya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut dari pada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi sering mengarah kepada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang akan meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003:137).

Dalam ekonomi makro investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran masyarakat untuk memperoleh alat-alat kapital baru. Oleh karena itu investasi total yang terjadi di suatu perekonomian sebagian berupa pembelian alat-alat baru untuk menggantikan alat-alat kapital yang sudah tidak ekonomis untuk dipakai lagi dan sebagian lain berupa pembelian alat-alat kapital baru untuk memperbesar stok kapital. Disisi lain investasi diartikan sebagai pengeluaran dari sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang atau jasa untuk menambah stok barang dan perluasan perusahaan.

2.1.2.2 Teori Investasi

1. Teori Neo Klasik

Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan ekonomi penduduk, makin cepat perkembangan volume stok *capital* rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio *capital* per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh neo klasik, yaitu Sollow dan Swan memutuskan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi *capital*, kemajuan teknologi, dan *output* saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

2.1.2.3 Faktor –Faktor yang mempengaruhi investasi

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkat keuntungan yang akan didapatkan

Investor akan menanamkan modalnya pada investasi yang memiliki dan memberikan prospek yang bagus dan menguntungkan. Apabila investasi sudah tidak menguntungkan dan tidak bagus lagi, investor akan berpindah pada jenis investasi yang lebih menguntungkan lainnya. Dalam hal ini investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik turunnya saham dapat mencerminkan apakah perusahaan tersebut baik atau tidak.

2. Tingkat suku bunga (*interest Rate*)

Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara investasi dan suku bunga adalah negatif. Oleh karena itu apabila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi akan menurun dan begitu pula sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak pada saat tingkat suku bunga relatif rendah.

3. Kemajuan teknologi

Dengan adanya kemajuan teknologi yang tinggi dan tepat guna maka akan menyebabkan meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi akan semakin banyak kegiatan pembaruan yang dilakukan oleh para pengusaha, sehingga tinggi tingkat investasi yang dicapai.

4. Ramalan kondisi masa depan

Ramalan mengenai tingkat keuntungan di masa yang akan datang akan memberikan gambaran para investor mengenai jenis-jenis prospek yang

dapat dilaksanakan dan besarnya investasi yang harus dikakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya

Pertambahan pendapatan nasional akan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat meningkat, begitu pun dengan daya beli masyarakat akan meningkat. Total *agregat demand* yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain.

2.1.2.5 Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1967 dan Undang-undang No 11 tahun 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan definisi Modal Asing antara lain:

1. Modal asing diartikan sebagai media pembayaran luar negeri yang bukan termasuk bagian dari devisa negara, yang berdasarkan persetujuan pemerintah Indonesia yang digunakan sebagai alat pembiayaan perusahaan yang ada.
2. Bagian hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

3. Modal asing didefinisikan sebagai pengadaan alat-alat perusahaan, hal ini termasuk penemuan-penemuan yang dimiliki oleh orang asing, selama sumber pembiayaan alat-alanya bukan dari kekayaan devisa negara.

2.1.2.6 Tujuan Penanaman Modal Asing

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Penanaman Modal Asing sebagai berikut:

- a. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara.
- b. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.
- c. Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain.
- d. Untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

2.1.2.7 Manfaat Penanaman Modal Asing

Menurut R Winantyo,dkk (208:178) potensi manfaat bagi negara penerima untuk mendorong aliran masuk Penanaman Modal Asing masuk adalah :

1. Perusahaan asing membawa teknologi yang lebih tinggi. Tingkat pemanfaatan teknologi oleh negara penerima bergantung pada derajat *spill-over* teknologi terhadap perusahaan domestik dan perusahaan asing.
2. Investasi asing meningkatkan kompetisi dan perekonomian negara penerima. Kehadiran perusahaan baru di luar sektor perdagangan dapat meningkatkan *output* dan menurunkan tingkat harga domestik, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Investasi asing mendorong peningkatan investasi domestik.
4. Investasi memberikan keuntungan dalam akses pasar ekspor.
5. Hal ini dilakukan melalui peningkatan skala ekonomi perusahaan asing atau kemampuan perusahaan asing untuk mengakses pasar luar negeri.
6. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

2.1.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan disebutkan pada pasal sebagai berikut:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Ayat 2).
2. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Ayat 5).
3. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Ayat 9).

2.1.3.1 Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri

Berikut ini adalah manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri:

- a. Mampu menghemat devisa.
- b. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing.
- c. Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan kedepan dan belakang.
- d. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

2.1.3.2 Faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu Penanaman Modal Dalam Negeri diantaranya sebagai berikut:

- a. Potensi dan karakteristik suatu daerah.
- b. Budaya masyarakat.
- c. Pemanfaatan era otonom daerah secara proposional.
- d. Peta politik daerah dan nasional.
- e. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah atas Belanja Modal (*Government Expenditures*)

Pengeluaran pemerintah merupakan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi (Sukirno, 2011:61). Dalam hal ini pemerintah sangat berperan dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan dari kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebijakan tersebut.

Menurut Bastian (2006:205), Pengeluaran pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua yaitu:

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintah sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi pembayaran angsuran dan bunga utang negara. Anggaran belanja rutin memiliki peran yang penting guna menunjang berjalannya pemerintahan. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan asset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian.

2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja negara dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan nasional. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan rupiah yang pendanaannya bersumber dari dalam negeri

dan luar negeri dan bentuk pinjaman program. Pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan proyek yang pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek.

Dasar dari teori pengeluaran pemerintah adalah identitas keseimbangan pendapatan nasional ($Y = C + I + G + (X - M)$). Dimana G merupakan pengeluaran pemerintah yang merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan dan penurunan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional. Pemerintah perlu memperhitungkan sasaran antara yang menikmati dan terkena kebijakan tersebut. Pemerintah juga perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan pihak swasta (Dumairi, 2006:42).

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Belanja pemerintah pusat

Definisi dari belanja pemerintah pusat menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 adalah belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah dan belanja lain-lain. Belanja pemerintah pusat terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang

- c. Belanja modal
- d. Pembiayaan bunga utang
- e. Subsidi
- f. Belanja hibah
- g. Bantuan social
- h. Belanja lain-lain

2. Belanja untuk daerah

Belanja untuk daerah mencakup seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah (Suminto, 2004:27). Belanja untuk daerah ini dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya berdasarkan perhitungan dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

2.1.5 Belanja Modal Pemerintah

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2011, belanja modal merupakan dana yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal diberikan untuk pengeluaran biaya perawatan yang bersifat menjaga atau menambah periode manfaatnya, meningkatkan kapasitas, dan kualitas aset.

Halim (2004:73) menyatakan, “Belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2011, Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah

Merupakan seluruh pengeluaran untuk pengadaan atau pembelian, pembebasan atau penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan.

2. Belanja modal peralata dan mesin

Merupakan Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Merupakan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Merupakan Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

2.1.6 Tenaga Kerja

2.1.6.1 Definisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja memiliki beberapa definisi, menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pada Undang Undang No 25 Tahun 1997 mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih, sedangkan undang-undang terbaru ketenagakerjaan yaitu Undang Undang No 13 Tahun 2013 tidak memberikan batasan umur dalam definisi tenaga kerja, namun pada undang undang tersebut melarang mempekerjakan anak-anak. Anak-anak menurut undang undang No 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan adalah orang laki-laki atau Wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sedang atau sedang bekerja, yang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1985). Tenaga kerja atau *manpower* terdiri

dari Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

2.1.6.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Untuk menemukan Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja diperlukan informasi, sebagai berikut:

- A. Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun yang data tersebut dengan penduduk usia kerja.
- B. Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela), penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan Angkatan kerja. Dengan demikian Angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan Angkatan kerja. Perbandingan antara Angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen tersebut dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja.

2.1.6.4 Teori Ketenagakerjaan

Ada beberapa teori mengenai ketenagakerjaan menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790), merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori

klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Keynes

Jhon Maynard Keynes (1883-1945), berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan menurun. Turunya pendapatan sebagian masyarakat akan menyebabkan turunya daya beli masyarakat, yang akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga.

3. Teori Malthus

Thomas Robert Malthus (1766-1834), dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan

deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai deret hitung.

Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi perkepala dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang dikeluarkan oleh Malthus adalah dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengangguran penduduk akan diselesaikan secara alamiah antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan dan sebagainya.

2.1.7 Teori Elastisitas

Menurut Rahardja (2004), dalam (Arifin, 2020), analisis elastisitas atau analisis sensitifitas digunakan untuk mengukur berapa persen satu variabel akan berubah, bila satu variabel lain berubah sebesar satu persen. Angka elastisitas (koefisien elastisitas) adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel lain yaitu variabel bebas, berubah satu persen.

Menurut Gujarati (2007) dalam (Aripin, 2020), teori elastisitas konstan cocok digunakan dalam permodelan dengan data penelitian ini. Teori elastisitas konstan merupakan teori yang model regresi linearnya berbentuk logaritma. Model logaritma akan mempermudah menentukan besaran elastisitas, karena koefisien variabel bebas dalam model logaritma adalah merupakan angka elastisitas, hal ini berbeda dengan bentuk regresi linier lainnya, yang koefisien variabel bebas dalam

model bukan merupakan angka elastisitas. Secara umum bentuk formulasi untuk mencari elastisitas, adalah sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas } (\beta) = \frac{d \log Y}{d \log X}$$

Kriteria pengelompokan elastisitas:

1. Elastis (*elastic/relatively elastic*). $\beta > 1$ artinya bersifat elastis, apabila terjadi kenaikan X sebesar 1% maka mengakibatkan penurunan Y sebanyak lebih dari 1%.
2. Elastis Sempurna (*perfect elastic*). $\beta = \infty$ (tak hingga) artinya bersifat elastis sempurna, apabila terjadi kenaikan X sebanyak 1% maka elastisitas Y akan berubah senilai tak terhingga (∞).
3. Elastisitas Uniter (*unitary elastic*). $\beta = 1$ artinya bersifat uniter, apabila terjadi kenaikan X sebanyak 1% maka terjadi penurunan Y sebanyak 1%.
4. Inelastis (*inelastic/relatively inelastic*). $\beta < 1$ artinya bersifat inelastis, apabila terjadi kenaikan X sebanyak 1% maka terjadi penurunan Y sebanyak kurang dari 1%.
5. Inelastis sempurna. $\beta = 0$ artinya bersifat inelastis sempurna, apabila terjadi kenaikan X sebanyak 1% maka Y akan tetap tidak ada perubahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai pengaruh penanaman modal asing,

penanaman modal dalam negeri, belanja modal pemerintah dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021.

Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengaruh Belanja Daerah serta Tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Utara (Machmud Al Amrie, Adi Aspian Nur, Amelia Ramadhani, 2017)	Menggunakan variabel terikat Produk Domestik Regional Bruto dan variabel bebas Tenaga Kerja	Menggunakan variabel bebas Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Utara, variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Utara
2	Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB Provinsi Papua (Andre Budihardjo, Fitri Arianti, Fuad Mas'ud, 2020)	Menggunakan Variabel terikat Produk Domestik Regional Bruto dan variable bebas Tenaga Kerja, Investasi	Menggunakan variable bebas Indeks Pembangunan Manusia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah, variable tenaga kerja tidak

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah, variable IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah
3	Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Unit Usaha terhadap PDRB industri pengolahan di Provinsi Jambi (Rica Citra Meisi, Zulfanetti, M Syurya H, 2021)	Menggunakan variable terikat PDRB, dan variable bebas Investasi	Menggunakan variable bebas Unit Usaha	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial investasi, tenaga kerja dan unit usaha sektor industri berpengaruh signifikan terhadap PDRB industri pengolahan Provinsi Jambi.
4	Pengaruh investasi, tenaga kerja, inflasi, dan konsumsi terhadap pendapatan domestik regional bruto (Jessica, Angelina, Ketherine, Alvia, 2022)	Menggunakan variable terikat PDRB dan variabel bebas investasi dan tenaga kerja	Menggunakan variabel bebas inflasi dan konsumsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi dan inflasi tidak berdampak pada PDRB di Sumatera Utara, sedangkan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				secara parsial variable tenaga kerja dan konsumsi berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara, Secara simultan, investasi, tenaga kerja, inflasi, dan konsumsi berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
5	Peran Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Kota Banjarmasin (Mirna Shahifah, Ika Chandriyanti, 2021)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas tenaga kerja, belanja pemerintah	Menggunakan variabel tingkat pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan belanja pemerintah secara bersama-sama atau simultan berperan terhadap PDRB di Kota Banjarmasin dan variabel tenaga kerja berperan paling dominan terhadap PDRB di Kota Banjarmasin

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pengaruh investasi dan tenaga kerja Terhadap PDRB di Jawa timur	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variaebl bebas investasi dan tenaga kerja		Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur, variabel Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur, nvestasi dan Tenaga Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur
7	Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Papua (Mursalam Salim)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas investasi dan tenaga kerja		Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan Jumlah Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Pemerintah Provinsi Papua, Secara parsial Jumlah Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Pemerintah Provinsi Papua.</p>
8	<p>Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara (Dewi Maharani, 2016)</p>	<p>Menggunakan variabel teriakt PDRB dan variabel bebas investasi dan tenaga kerja</p>		<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa nvestasi Domestik, Investasi Asing dan Tenaga Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pengaruh Listrik, Modal dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Galuh Nugraha, M Faisal Akbar, Hamsani, 2022)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas tenaga kerja	Menggunakan variabel bebas listrik dan modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial daya terpasang listrik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah tenaga kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa daya terpasang listrik, PMTB, dan jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Kepulauan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Bangka Belitung
10	Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi (Siti Marlina AZ, Siska Pebrina)	M, menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas investasi dan tenaga kerja	Menggunakan variabel bebas PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat investasi dalam penelitian ini secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi
11	Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Di Provinsi	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel	Menggunakan variabel bebas tingkat Pendidikan, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendidikan, Angkatan kerja, pengeluaran pemerintah berpengaruh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sumatera Selatan (Riza Fahlewi, Retno Riki Chairul Amri, Adesy Mayang Sari, 2020)			Signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan, dan secara parsial Variabel Pendidikan tidak berpengaruh terhadap PDRB, Variabel Angkatan Kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB, Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.
12	Pengaruh Migrasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten Jember Tahun 2003-2011 (Denik Dwi Susanti, Siti Komariyah, Fivien Muslihatinningsih)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas tenaga kerja	Menggunakan variaebl bebas migrasi	Hasil penelitain menunjukkan bahwa bahwa variabel migrasi masuk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Jember tahun 2003-2011, Sedangkan migrasi keluar dan tenaga kerja secara parsial

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Jember 2003-2011, variabel bebas yaitu migrasi masuk, migrasi keluar, dan tenaga kerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu PDRB Kabupaten Jember tahun 2003-2011
13	Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2019 (Yois Nelsari Malau, Lilyana Loren, Catherine, Selvia Hendrawan, 2020)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas investasi dan tenaga kerja	Menggunakan variabel bebas ekspor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam hasil analisis ditemukan bahwa variabel tersebut secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PDRB, Tenaga kerja dalam hasil analisis ditemukan bahwa variabel tersebut

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB, Ekspor dalam hasil analisis ditemukan bahwa variabel tersebut secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PDRB, nvestasi, tenaga kerja, dan ekspor ditemukan bahwa seluruh variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap PDRB.
14	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional bruto (38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa			Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jawa Timur Tahun 2011-2016) (Asya Yandi Dea Kristina, 2017)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas tenaga kerja	Menggunakan variabel bebas PAD dan IPM	
15	Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh) (Said Yunus, Amirulah, 2019)	Menggunakan variabel terikat PDRB / Perteumbuhan Ekonomi, dan menggunakan variabel bebas belanja modal	Menggunakan Variabel bebas PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh, akan tetapi tidak signifikan, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2016).

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, belanja modal pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Jawa Barat.

2.3.1 Hubungan antara penanaman modal asing dengan PDRB

Penanaman Modal Asing merupakan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing termasuk kedalam faktor kegiatan pembangunan ekonomi. PMA merupakan suatu cara yang dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto untuk jangka Panjang yang dapat menaikkan standar hidup masyarakat.

Menurut Dewi Maharani (2016) yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sumatera Utara” menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai hubungan yang positif terhadap PDRB. Sehingga apabila PMA meningkat maka PDRB akan meningkat juga.

2.3.2 Hubungan anatara penanaman modal dalam negeri dengan PDRB

Menurut teori klasik bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi penanaman modal atau investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan, sehingga produk domestik bruto meningkat (Sukirno, 2008).

Penanaman modal sangat penting karena merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Penanaman dalam bentuk

modal atau peralatan tidak hanya meningkatkan produksi tetapi dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kemudian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan.

Menurut Rica Citra Meisi, Zulfanetti, M Syurya Hidayat (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Investasi, tenaga kerja, dan unit usaha terhadap PDRB industry pengolahan di Jambi” menyatakan bahwa Penanaman Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jambi.

Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merupakan salah satu investasi mampu meningkatkan PDRB. Oleh karena itu apabila penanaman modal dalam negeri naik, maka akan meningkatkan PDRB.

2.3.3 Hubungan antara belanja modal pemerintah dengan PDRB

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk skala nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk skala daerah atau regional.

APBD merupakan bentuk akumulasi dari modal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sasaran dari penggunaan pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

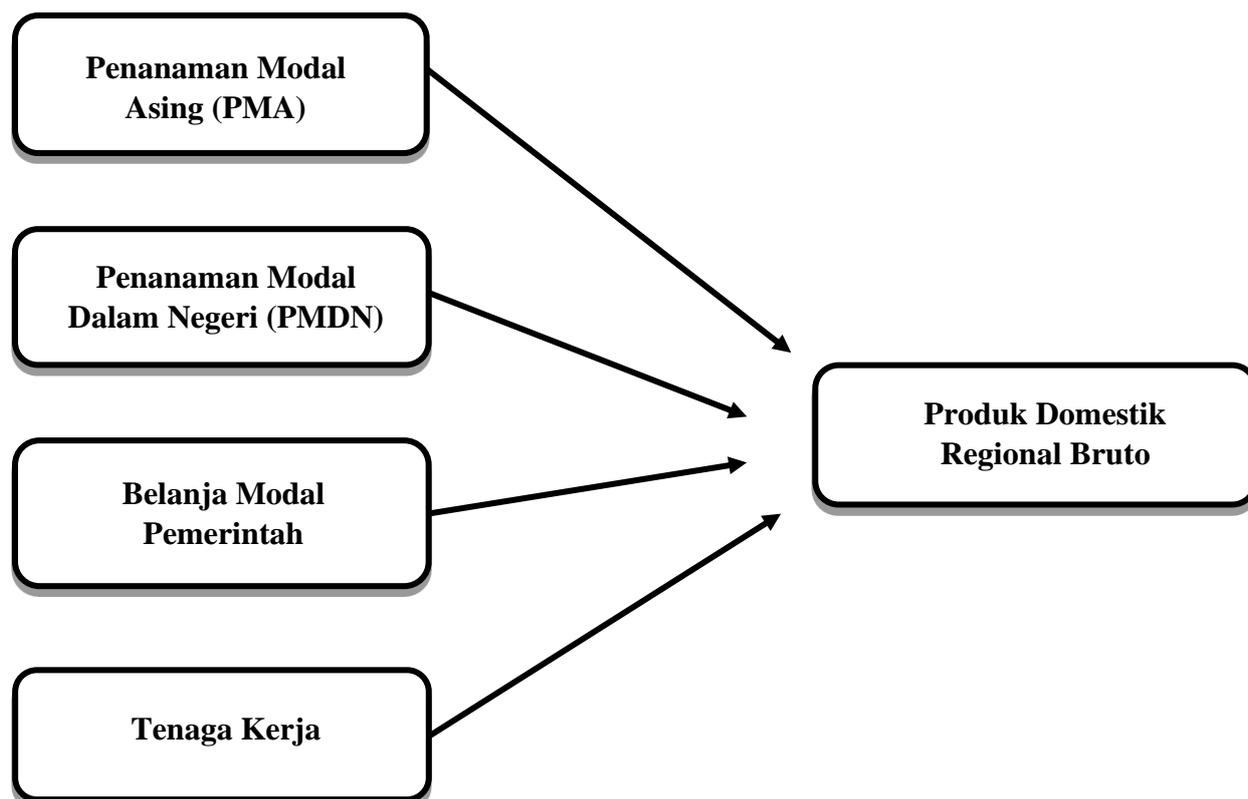
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mirna Shahifah dan Ika Chandriyanti (2021) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB Kota Banjarmasin. Kemudian diperkuat lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hernimas Naufallia Husna, dkk, 2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2004-2018” yang hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB.

2.3.4 Hubungan antara Tenaga Kerja dengan PDRB

Tenaga kerja dipandang sebagai satu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan faktor produksi lainnya (mengelola tanah, memanfaatkan modal, mesin dan lain sebagainya) sehingga menghasilkan tambahan output produksi yang kemudiab akan menaikkan output nasional. Tanpa adanya peran tenaga kerja maka kegiatan produksi tidak berjalan, namun jika penggunaan tenaga kerja yang tidak memadai juga akan mengganggu jalannya proses produksi sehingga output produksi juga menurun, hal ini akan menurunkan tingkat konsumsi dan berakibat menurunkan tingkat investasi, bila investasi rendah pada akhirnya akan membuat kegiatan perekonomian memburuk. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Linda Sitompul (2017) yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, belanja modal pemerintah dan tenaga kerja

mempengaruhi PDRB. Untuk dapat lebih jelas mengenai kerangka pemikiran tersebut maka dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil uji tersebut akan dapat digunakan sebagai saran dalam menentukan kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hipotesis adalah satu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara.

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Diduga Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Dalam Negeri (PMDN), Belanja Modal Pemerintah dan Tenaga Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021.
2. Diduga Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Dalam Negeri (PMDN), Belanja Modal Pemerintah dan Tenaga Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021.
3. Diduga tingkat elastisitas Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Dalam Negeri (PMDN), Belanja Modal Pemerintah dan Tenaga Kerja adalah bersifat inelastis artinya ($E < 1$).